

## DINAMIKA PERFILMAN INDONESIA TAHUN (1940-1966)

**M. Fajar Yulia Fahmi**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Email: [fajar.18101@mhs.unesa.ac.id](mailto:fajar.18101@mhs.unesa.ac.id)

**Rojil Nugroho Bayu Aji**

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [rojilaji@unesa.ac.id](mailto:rojilaji@unesa.ac.id)

### Abstrak

Film, sejak awal perkembangannya telah menjadi sebuah fenomena yang menarik dengan berkembangnya teknologi dan penerapannya sehingga film dalam kategori seni, baik sebagai hiburan hingga ekspresi pembuatnya serta kajian komunikasi sebagai sarana penyampaian pesan yang dianggap efektif sebagai, kemudian kajian sejarah yang dihubungkan dengan kemampuan untuk mendapatkan bukti sejarah perkembangan peradaban sebuah bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Bagaimana dinamika perkembangan perfilman di Indonesia tahun 1940-1966? (2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam perkembangan industri perfilman Indonesia pada tahun 1940-1966?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, antara lain Heuristik, verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Dalam melakukan penelitian, penulis mengumpulkan sumber primer berupa arsip pemerintah tentang perfilman yang terdiri dari Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan majalah yang membahas tentang perfilman Indonesia, kemudian melakukan kritik pada sumber yang diperoleh dengan melakukan kritik intern dan ektern, selanjutnya melakukan penyaringan informasi sumber yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Terakhir, melakukan penulisan tentang dinamika perfilman Indonesia tahun 1940-1966.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perkembangan perfilman Indonesia tahun 1940-1966 telah mengalami dinamika dalam perkembangannya dari masa Hindia Belanda hingga Orde Lama. Kemudian memunculkan beberapa hambatan-hambatan antara lain kebijakan sensor yang diterapkan pada masa Hindia Belanda hingga masa Orde Lama, banyaknya film impor yang masuk ke Indonesia membuat industri perfilman Indonesia gagal bersaing dalam segi cerita maupun kualitas sehingga film Indonesia kurang diminati oleh masyarakat, Serta Gejolak Politik yang terjadi pada masa Orde Lama yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada perfilman Indonesia.

**Kata Kunci:** Dinamika, Perfilman

### Abstract

*Film, since the beginning of its development has become an interesting phenomenon with the development of technology and its application so that films are in the art category, both as entertainment to the expression of their creators as well as communication studies as a means of delivering messages which are considered effective as, then historical studies associated with the ability to obtain evidence. History of the development of civilization of a nation. This study aims to analyze (1) How was the history of the development of film in Indonesia in 1940-1966? (2) What were the obstacles in the development of the Indonesian film Industry in 1940-1966?*

*This study uses historical research methods that consist of four stages, including Heuristics, Verification, Interpretation, and Historiography. In conducting the research, the authors collect primary sources in the form of government archives on film consisting of Ordinances, Laws and Government Regulations, while secondary sources are obtained from books, journals, and magazines that discuss Indonesian film, then criticize the sources obtained by conducting research. Internal and external criticism, then filtering the source information obtained from primary and secondary sources. Finally, writing about the dynamics of Indonesian cinema in 1940-1966.*

*The results obtained indicate that the development of Indonesian film in 1940-1966 has experienced dynamics in its development from the Dutch East Indies to the Old Order. Then raised several obstacles, including the censorship policy that was applied during the Dutch East Indies period until the Old Order era, the large number of imported films entering Indonesia made the Indonesian film industry fail to compete in terms of story and quality so that Indonesian films were less attractive to the public, as well as political turmoil. that occurred during the Old Order which resulted in policies that had an impact on Indonesian cinema.*

**Keywords:** Dynamic, Film

## PENDAHULUAN

Film sebagai media rakyat yang bersifat kompleks. Film adalah sebuah karya estetis dan juga sebagai media informasi yang seringkali menjadi media hiburan bahkan menjadi media propaganda politik. Film tidak hanya dilihat dari sisi seni modern tetapi juga dilihat dari sisi historis, social-budaya, politik maupun ekonomi. Film sebagai media audio-visual yang menarik, perkembangan Film di Indonesia sendiri sudah hadir sejak masa Kolonial Belanda. Namun, dalam perkembangan Film di Indonesia pada masa Kolonial tidak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.<sup>1</sup>

Film berfungsi sebagai media baru yang digunakan dalam menyebarkan hiburan yang menyajikan peristiwa, drama, komedi, dan sajian lainnya kepada penonton.<sup>2</sup> Dalam perkembangan kesusastraan Indonesia berpengaruh berkembangnya kesadaran politik, film tidak terpengaruh dari kesadaran politik. Namun, masa pendudukan Jepang, film cenderung digunakan sebagai media propaganda politik.<sup>3</sup> Pembuatan film pada masa pendudukan Jepang membawa angin segar dalam proses pembuatannya. Meskipun Jepang tidak membawa ahli perfilman tetapi menciptakan pengertian tentang fungsi film yaitu sebagai alat komunikasi Massa yang kemudian digunakan untuk membangun industry Film Nasional di masa kemerdekaan.<sup>4</sup>

Pada masa Kolonial Belanda, penyensoran film diatur dalam *Ordonasi Biooscope* tahun 1916 untuk mengawasi film-film yang dipertontonkan melalui Badan Sensor Film yang didirikan pada tahun yang sama.<sup>5</sup> Penyensoran ini dilaksanakan karena Pemerintah Kolonial Belanda khawatir terhadap pengaruh seks bebas dan kekerasan yang bisa mempengaruhi kewibawaan bangsa Barat di mata rakyat Pribumi.<sup>6</sup> Ordonasi ini mengalami berbagai perubahan yang tertera dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) No. 337 dan No. 688 tahun 1922 dan diperkuat dengan *Ordonasi Film* (*Filmordonnantie Staatsblad*) No. 507 tahun 1940.<sup>7</sup>

Perkembangan film pada masa pendudukan Jepang, memberikan pandangan baru dalam pembuatan film yang didasarkan pada pengetahuan perfilman yang membuat alur cerita film lebih hidup dan menarik. Penjajahan Jepang berusaha membuat film yang memuat propaganda dengan merapkan tiga kebijakan yaitu; (1) Mendirikan lembaga khusus yang memproduksi film cerita dan dokumenter; (2) Mendirikan lembaga pembuatan film yang berisikan

tokoh-tokoh perfilman Indonesia ini ikut serta dalam proses produksi, publikasi dan mendistribusi film; (3) Menetapkan kebijakan yang bisa mengatur distribusi film melalui gedung bioskop maupun pertunjukan keliling.<sup>8</sup>

Pada masa Orde Lama (1945-1966), suasana awal kemerdekaan seharusnya memberikan suasana baru dalam industri perfilman nasional. Tetapi, keadaan politik saat itu yang kurang stabil membuat situasi menjadi kurang kondusif. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kebijakan politik tidak selaras juga berimbas pada industry perfilman Indonesia. Melihat kondisi negara yang masih belum stabil, Presiden Soekarno berinisiatif membuat penyatuan dalam Demokrasi Terpimpin yang kemudian menerima banyak tantangan dan hambatan yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno juga memunculkan aksi pemboikotan film-film yang berasal dari luar negeri.<sup>9</sup>

Industri film memiliki perbedaan yang mendasar dengan industry lainnya. Factor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam industry film adalah bagaimana sebuah film dapat mempengaruhi emosi penonton. Keberhasilan sebuah film juga ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan simulakrasimulakra<sup>10</sup> yang mampu menciptakan hiperealitas.<sup>11</sup> Kemajuan perfilman ditentukan oleh kebijakan perfilman yang harus melalui kajian terhadap sejarah perkembangannya yang dianalisa dengan empat tahapan rangkaian industry film yaitu: produksi, distribusi, promosi dan konsumsi.<sup>12</sup>

Dari uraian diatas, maka muncullah masalah pokok dalam penelitian yang berjudul **“DINAMIKA PERFILMAN DI INDONESIA TAHUN 1940-1966”**. Adapun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perkembangan perfilman di Indonesia tahun 1940-1966?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam perkembangan industri perfilman di Indonesia pada tahun 1940-1966?

Penelitian ini berfokus pada sejarah perkembangan perfilman di Indonesia serta sebisa mungkin untuk menemukan permasalahan dalam perkembangan perfilman di Indonesia. Dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sejarah perkembangannya dan masalah dalam perkembangan perfilman di Indonesia selama kurun waktu 1940 hingga 1966.

<sup>1</sup> Novia, “Lambannya Pertumbuhan Perfilman Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9 No. 3 (Maret 2006), 271-272.

<sup>2</sup> McQuail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm. 13.

<sup>3</sup> Usmar, *Mengupas Film*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), hlm. 53.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>5</sup> Pahotan, *Seks dalam Film Indonesia, 1970-1996: Bumbu Film Indonesia* (Depok: Skripsi UI, 2009), hlm. 14.

<sup>6</sup> Heru, *Sejarah Sensor Film di Indonesia* (Bandung: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2010), hlm. 2

<sup>7</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>8</sup> Elvy, *Paradoks dan Manajemen Kreativitas dalam Industri Film* (Salatiga: Satya acana University Press, 2016), hlm. 72.

<sup>9</sup> Misbach, *Sejarah Film 1900 - 1950: Bikin Film di Jawa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 27.

<sup>10</sup> Simulakra adalah bentuk pikiran imajinasi terhadap sebuah kenyataan, yang tidak menghasilkan realitas itu sendiri. Handrini, “*Perfilman Indonesia: Perkembangan dan Kebijakan, Sebuah Telaah dari Perspektif Industri Budaya*”, *Jurnal Kajian* Vol. 22 No. 2 (Juni 2017), hlm. 79-95.

<sup>11</sup> Hiperealitas adalah suatu kondisi kepalsuan yang bersatu dengan keaslian yang menciptakan seolah-olah menjadi sebuah kenyataan. *Ibid.*, hlm. 79-95.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 79-95.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode penelitian sejarah. Diawali dengan Heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber sejarah sebagai data. Sumber yang diperoleh adalah sumber primer dan sekunder berdasarkan studi kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kemudian Verifikasi, yaitu melakukan kritik terhadap sumber data sejarah yang relevan dan akurat sehingga dapat meneliti fakta sejarah. Selanjutnya, interpretasi yaitu, menafsirkan hubungan antar fakta. Dan terakhir adalah Historiograf, yaitu menuliskan peristiwa sejarah.<sup>13</sup>

Tahapan pertama adalah Heuristik, yaitu mengumpulkan dan menemukahn sumber-sumber sejarah yang didapatkan dari sumber primer maupun sekunder yang didapatkan dari Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, dan beberapa koleksi pribadi penulis. Sumber Primer diperoleh antara lain adalah dokumen atau arsip pemerintah Hindia Belanda hingga masa Orde Baru yang mengatur tentang perfilman nasional. Dokumen atau arsip ini berisi tentang berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga yang mengurus perfilman Indonesia. Sumber Sekunder didapatkan melalui studi pustaka berupa buku, jurnal, berita koran dan penelitian yang relevan dengan tema permasalahan yang diteliti. Sumber Sekunder dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari buku yang pernah ditulis dan mengandung sumber primer. Sumber Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya dari Usmar Ismail yang berjudul "*Mengupas Film*" yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan industri perfilman Indonesia. Selain itu ada pula buku "*Film Indonesia bagian I: 1900-1950*" karya Taufik Abdullah, Misbach Yusa Biran, dan S.M. Ardan yang membahas film dari tahun 1900-1950. Kemudian adapula buku "*Selintas Kilas Sejarah Film Indonesia*" karya Misbach Yusa Biran yang membahas bagaimana perjalanan perfilman Indonesia pada masa awal kemunculannya hingga awal tahun 1980-an. Selain Sumber buku, adapula penelitian yang dilakukan oleh Eka Nada Shofa Alkhajar dalam Tesis yang berjudul "*Masa-masa Suram Dunia Perfilman Indonesia*". Dalam Tesis yang diterbitkan oleh Universitas Sebelas Maret ini, penulis meneliti tentang apa saja penyebab dari terpuruknya industry perfilman Indonesia. Pada sumber ini juga memuat informasi umum dan gambaran singkat tentang masa-masa terpuruknya industry perfilman Indonesia. Selanjutnya karya dari Heru Erwantoro yang berjudul "*Sejarah Sensor Film Di Indonesia Masa Hindia Belanda Dan Pendudukan Jepang (1916 – 1945)*". Dalam penelitian yang penulis meneliti tentang masalah Penyensoran yang dilakukan pada masa Kolonial Belanda hingga masa Pendudukan Jepang. Kemudian karya Novia Kurnia yang berjudul "*Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman Indonesia*" yang meneliti tentang bagaimana

lambannya pertumbuhan industry Film di Indonesia. Hal ini menjadi latar belakang mengapa penulis mencantumkan sumber-sumber diatas karena disertai dengan bukti serta kebenaran data.

Tahapan Kedua adalah Kritik Sumber yang menyaring dan memilah informasi yang didapatkan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan agar data-data yang diperoleh memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan karya tulis yang bersifat ilmiah. Kritik sumber sangat diperlukan dalam melakukan penelitian. Kritik sumber atau verifikasi bertujuan untuk melakukan pemilihan data sehingga dapat memperoleh fakta atau kebenaran sejarah. Kritik sumber terdiri dari Kritik Intern dan Ekstern. Kritik Intern dilakukan setelah yakin bahwa sumber yang dikehendaki dengan menggunkan penilaian intrinsik sumber yakni penilaian yang membuktikan penulis mengetahui dengan pasti dalam memberikan keterangan sejarah yang benar. Sedangkan Kritik ekstern berkaitan dengan sumbernya, yaitu apakah sumber yang didapat asli atau palsu, kemudian sumber tersebut apakah masih utuh atau sudah berubah.

Tahapan Ketiga adalah Interpretasi, yaitu penyaringan informasi-informasi yang berasal dari sumber-sumber kemudian menghasilkan data yang objektif yang digunakan untuk mendukung penelitian. Interpretasi, yakni tahap dalam merangkaikan data yang ada dengan berusaha membuat gambaran tentang Sejarah Perfilman Indonesia yang sebenarnya dengan berdasarkan sumber yang diperoleh dari sumber berupa jurnal, buku-buku di perpustakaan maupun Arsip Nasional.

Tahapan Keempat adalah Historiografi, merupakan tahapan akhir dari metodologi penelitian sejarah. Dalam tahapan ini penulis memerlukan kemampuan penelitian sejarah yang baik sehingga penelitiannya memenuhi standar yang harapannya mampu menjadikan penelitian sejarah menjadi runtut dan terdapat hubungan sebab akibat dalam peristiwanya. Pada tahapan historiografi, penulis akan melakukan penulisan berdasarkan hasil tahapan sebelumnya menjadi utuh mengenai Sejarah Perfilman Indonesia tahun 1940-1966.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perfilman Indonesia tahun 1940-1966

Penduduk di Hindia Belanda pertama kali mengetahui pertunjukan gambar hidup di rumah Tuan Schwarz yang berada daerah Tanah Abang Kebondjae yang diadakan pada 5 Desember 1900.<sup>14</sup> Selanjutnya, Rumah Tuang Schwarz ini dijadikan sebuah gedung bioskop yang pertama. Gedung ini bernama The Rojal Bioscope, kemudian diberbagai wilayah di Hindia Belanda khususnya wilayah Batavia dan Surabaya mulai dibuka beberapa gedung bioskop.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Haris, *Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 1.

<sup>15</sup> Ryadi, "*Sejarah Perfilman Indonesia*" dalam *Majalah Prisma* No. 5, Tahun XIX 1990, hlm. 21.

<sup>13</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), hlm. 89.



Dalam hal pembuatan film, Pada mulanya film yang diproduksi berupa film documenter saja. Pada tahun 1910 film documenter yang dibuat adalah film yang membahas kehidupan di Hindia Belanda yang bertujuan agar masyarakat yang berada di Belanda mengetahui keadaan dari tanah jajahannya.<sup>16</sup> Pada awal berkembangnya film Indonesia, film yang ditampilkan di bioskop belum memiliki cerita yang menarik. Film-film yang ditayangkan di bioskop pada masa itu adalah kumpulan berbagai macam potongan film yang kemudian disambung lagi. Hasil guntingan dari Komisi Sensor ini semata-mata hanya digunakan sebagai barang dagangan dari pedagang film dari Tiongkok.<sup>17</sup>

Pada tahun 1926, Film Loetoeng Kasaroeng merupakan film pertama yang dibuat di Indonesia yang mengangkat cerita rakyat dari Priangan, Jawa Barat, diproduksi oleh Java Film Company dan disutradarai oleh L. Heuveland dan G. Kruger.<sup>18</sup> Kemudian film ini ditayangkan di bioskop selama 6 hari dari tanggal 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.<sup>19</sup> Industri Perfilman pada masa Hindia Belanda seluruhnya masih dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari Eropa dan Tiongkok.<sup>20</sup> Hingga tahun 1930, film yang diproduksi semuanya masih berupa film bisu. Setelah itu pada tahun 1931, film dengan suara pertama, yaitu *Atma de Visser*, yang disutradarai oleh G. Krugers.<sup>21</sup>

Produksi film meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1940, dunia film didominasi orang panggung.<sup>22</sup> Pada tahun 1942, Jumlah produksi film terhenti hal ini disebabkan Kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang kemudian menghentikan operasional semua perusahaan film yang ada di Indonesia dan memberikan fasilitas terhadap pertunjukan sandiwara keliling.<sup>23</sup> Kelompok sandiwara "Bintang Surabaya" pimpinan Fred Young adalah kelompok sandiwara yang terkenal pada masa itu. Kelompok sandiwara yang didirikan oleh Usmar Ismail yang bernama "Maya" yang anggotanya terdiri dari berbagai kalangan terpelajar.<sup>24</sup>

Pemerintah Jepang mengambil alih *NV Multi Film* perusahaan film milik Pemerintah Hindia Belanda dan mengubahnya menjadi *Jawa Eiga Kosha* di bawah *Sendenbu* (Departemen Dalam Negeri).<sup>25</sup> Badan ini

bersifat sementara yang kemudian dibubarkan setelah membentuk *Nippon Eigasha* (Lembaga Produksi Film) yang dipimpin oleh S. Oya dan T. Ishimoto yang wakilnya merupakan orang Indonesia bernama RM. Soetarto.<sup>26</sup> Ahli perfilman dari Jepang yang juga seorang sutradara terkenal bernama Bunjin Kurata didatangkan untuk menjadi penasihat dan sebagai pimpinan film cerita.<sup>27</sup> *Eiga Haikyusha* yang bertugas mendistribusikan film.<sup>28</sup> Film-film yang diproduksi pada masa pendudukan Jepang adalah film-film propaganda yang lebih menggunakan segi efektifitas dalam penyampaian ide dan gagasan dalam film, namun sama sekali tidak memiliki unsur komersial. film-film yang diproduksi oleh Pemerintah Jepang, seperti *Kesebrang*, *Berdjuang*, *Amat Heihi*, *Di Desa* dan *Koeli dan Romusha*. Film *Koeli dan Romusha* menggambarkan bahwa kehidupan Romusha lebih baik daripada kuli zaman Belanda.<sup>29</sup>

Kondisi dunia perfilman pada masa pendudukan Jepang memiliki akibat yang positif dan negatif. Berakibat positif, karena terjadi perubahan fungsi film yang sebelumnya dianggap seolah-olah sebagai barang dagangan, pada masa pendudukan Jepang film dianggap sebagai produk seni, alat menyadarkan masyarakat<sup>30</sup>, dan alat pendidikan rakyat<sup>31</sup>. Orang Pribumi pun juga sangat terlibat aktif dalam dunia perfilman, meskipun semuanya masih dibawah pengaruh pemerintah Jepang.<sup>32</sup> Sedangkan akibat negatinya, para pekerja film pada masa sebelumnya kehegian profesi mereka karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintah Jepang dan jumlah bioskop juga mengalami penurunan.<sup>33</sup>

Pada tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu yang kemudian diberi tugas untuk menjaga status quo di Indonesia sebelum kedatangan Sekutu. Kemudian kekosongan itupun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi oleh tentara NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*). Kemudian, terjadilah agresi militer di Indonesia antara Tentara perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan tentara NICA (1945 – 1949).<sup>34</sup> Oleh karena hal itu, dunia perfilman Indonesia tersenti selama 3 tahun. Beberapa kelompok sandiwara seperti "Seniman Merdeka" (eks *Maya*), "Pantjawarda", "Ratoe Asia" (pimpinan Samsudin Sjafei di Sumatera), dan "Bintang Timoer" (Milik Djamiludin Malik), sering masuk kampung-kampung untuk memberikan sebuah hiburan kepada para pejuang dan mengobarkan semangat untuk

<sup>16</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>17</sup> Ryadi, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>19</sup> Widjaya, "Sekilas Sejarah Film Indonesia 1900-2007" dalam *Majalah Cinemags November 2007*, hlm. 93.

<sup>20</sup> Ryadi, *op. cit.*, hlm. 21.

<sup>21</sup> Kristanto dkk, *Katalog Film Indonesia 1926-2007* (Jakarta: Nalar, 2005), hlm. 7.

<sup>22</sup> Kebanyakan produser dan sutradara yang berasal dari etnis Tionghoa lebih menjadikan film sebagai barang komersial. Ardan, *Dari Gambar Idoep ke Sineplek* (Jakarta: Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia, 1992), hlm. 26.

<sup>23</sup> Misbach, *Selintas Kilas Sejarah Film Indonesia* (Jakarta: Badan Pelaksanaan FFI, 1982), hlm. 17.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>25</sup> Ryadi, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>26</sup> Eddy, *Mengenal Perfilman Nasional* (Bandung: CV Rosda, 1987), hlm. 20.

<sup>27</sup> Elvy, *op. cit.*, hlm. 72.

<sup>28</sup> Ryadi, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>29</sup> Kristanto dkk, *op. cit.*, hlm. 12.

<sup>30</sup> Ryadi, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>31</sup> Salim, *Profil Dunia Film Indonesia* (Jakarta: Grafiti Pers, 1982), hlm. 39.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>33</sup> Ardan, *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>34</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 19.

berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.<sup>35</sup> Kemudian, R.M. Soetarto mengubah Nippon Eigasha menjadi Berita Film Indonesia (BFI) yang kemudian diambil alih dan diubah oleh Belanda menjadi South Pacific Film Corp (SPFC) pada tahun 1948.<sup>36</sup>

Pada masa Revolusi fisik ini, Dr. Huyung (Hinatsu Heitara) seorang tentara Jepang keturunan Korea yang memilih memihak Indonesia mendirikan sekolah film dan teater yang pertama Indonesia yang bernama *Cino Drama Ateiler* (CDA) pada tahun 1948. Pada tahun yang sama Departemen Penerangan RI membentuk *Kino Drama Institut* (KDI) sebagai wadah pendidikan perfilman dan sandiwaranya.<sup>37</sup> Pada Desember 1949, setelah terjadi revolusi fisik antara Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan dengan Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Perasaan rakyat Indonesia yang masih memiliki semangat nasionalisme yang tinggi membuat film produksi Indonesia menjadi hidup kembali dan banyak orang dari pentas-pentas sandiwaranya kemudian ditarik kembali ke dunia perfilman.<sup>38</sup> Namun, film yang diproduksi di Indonesia masih dipegang oleh perusahaan-perusahaan milik orang Tiongkok dan Belanda yang berlangsung hingga tahun 1950.<sup>39</sup>

Film *Darah dan Doa* (*The Long March of Siliwangi*) yang disutradarai oleh Usmar Ismail memulai pengambilan gambar pada tanggal 30 Maret 1950, kemudian tanggal ini diperingati sebagai Hari Perfilman Nasional<sup>40</sup> dan Usmar Ismail diangkat menjadi Bapak Perfilman Nasional.<sup>41</sup> Usmar Ismail dengan menggunakan modal nasional mendirikan perusahaan film pertama yaitu, Perusahaan Film Nasional (Perfini), tenaga produksi, bintang film, serta sutradara yang merupakan orang-orang Indonesia. Perfini ini dibentuk dengan tujuan agar bisa mengembangkan film dengan menggunakan identitas nasional agar melahirkan film-film Indonesia yang menarik dan bermutu sehingga bisa bersaing dengan film-film mancanegara.<sup>42</sup>

Pada tanggal 23 April 1953, Djamiluddin Malik mendirikan lembaga yang berfungsi sebagai tempat bernaungnya artis film dan sandiwaranya yaitu Persari (Perseroan Artis Film Republik Indonesia).<sup>43</sup> Persari lebih memproduksi film-cim dengan cerita-cerita ringan tetapi tidak menghilangkan sisi artistic dalam film.<sup>44</sup> Kemudian Persari memproduksi film *Rodrigo de Villa* (1952) yang merupakan film kerjasama dengan perusahaan film Filipina yaitu LVN

Studio dan perusahaan film Indonesia yaitu (Persari), film ini disutradarai oleh dua sutradara dari Filipina dan Indonesia yaitu Gregorio Fernandes dan Rempo Urip, film ini merupakan film berwarna di Indonesia.<sup>45</sup> Usmar Ismail dan Djamiluddin Malik merupakan tokoh perfilman Indonesia yang memiliki perbedaan pandangan dalam menangani perfilman nasional. Usmar Ismail ingin membuat film yang lebih menggunakan identitas nasional. Sedangkan Djamiluddin Malik ingin membuat film yang bernilai komersial namun masih mempertahankan sisi artistic dalam film.<sup>46</sup> Selain kedua tokoh perfilman ini, pemerintah juga ikut terlibat dalam pengembangan perfilman nasional. Salah satu usaha dalam mengembangkan perfilman nasional adalah membentuk PFN (Perusahaan Film Negara).<sup>47</sup>

Pada tanggal 30 Maret hingga 5 April 1955, pertama kali Festival Film Indonesia (FFI) diselenggarakan di Indonesia.<sup>48</sup> Kegiatan ini diketuai oleh Djamiluddin Malik yang bertujuan untuk menyeleksi film Indonesia yang akan diikutsertakan dalam festival-festival film internasional. Selain itu, festival ini juga bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha perfilman Indonesia. Namun, pada tahun 1955 festival ini tidak diselenggarakan lagi dan kemudian baru pada tahun 1960 diselenggarakan kembali yang diprakarsai oleh produser-produser film. Namun, jumlah produksi film nasional masih tidak bisa mampu bersaing dengan film-film impor, maka pada tahun berikutnya festival ini tidak dapat dilanjutkan lagi.<sup>49</sup>

## B. Hambatan dalam perkembangan Industri Perfilman Indonesia pada tahun 1940 – 1966

Dalam perkembangan industry perfilman Indonesia terdapat berbagai masalah-masalah, antara lain:

### 1. Kebijakan Sensor Film Indonesia

Salah satu masalah dalam dunia perfilman Indonesia adalah penyensoran. Pada masa Kolonial Hindia Belanda sudah ada peraturan penyensoran yang mulai diterapkan di bioskop pada tahun 1900. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran dari Kolonial Hindia Belanda terhadap adanya pemberontakan di tanah jajahannya.<sup>50</sup> Pada masa Hindia Belanda, dikeluarkan ordinansi yang mengatur tentang penyensoran yaitu, "*Ordonansi Bioscope 1916*"<sup>51</sup>. Dalam Ordinansi ini Pemerintah Kolonial melakukan berbagai penyensoran terhadap film-film yang akan ditayangkan yang mengandung seks bebas dan kekerasan yang dikhawatirkan akan berdampak buruk

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>37</sup> Misbach, *op. cit.*, hlm. 19.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>39</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 21.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>41</sup> Kristanto, Nonton Film Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 15.

<sup>42</sup> Eddy, *op. cit.*, hlm. 30-31.

<sup>43</sup> *Buku Kenang-kenangan Perseroan Artis Indonesia (Persari) 5 Tahun* (Jakarta: Persari, 1955), hlm. 12.

<sup>44</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>45</sup> Dalam sumber lain, film berwarna pertama yang diakui adalah film yang berjudul *Sembilan* (1968) yang disutradarai oleh Wim Umboh yang dalam proses produksinya seluruhnya dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia. Widjaya, *op. cit.*, hlm. 95.

<sup>46</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>48</sup> *Sunday Courier*, "Festival Film Indonesia ke 1". 13 April 1955.

<sup>49</sup> Amura, *Perfilman di Indonesia dalam Era Orde Baru* (Jakarta: Lembaga Komunikasi Massa Islam Indonesia, 1989), hlm. 42-43.

<sup>50</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>51</sup> Heru, *op. cit.*, hlm. 2.

bagi kewibawaan bangsa barat dimata Pribumi.<sup>52</sup> Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk Lembaga Sensor yang diberi nama “*Commissie voor de Kueing van Films*” atau Komisi Pemeriksa Film (KPF) yang bertugas melakukan penyensoran film pra-produksi.<sup>53</sup> Komisi ini memiliki wewenang, antara lain: mengizinkan film, mengizinkan pertunjukan film, dan menolak film seutuhnya atau sebagian.<sup>54</sup> KPF dibentuk di empat kota yaitu: Batavia, Medan, Surabaya, dan Semarang.<sup>55</sup> Dalam pembentukan KPF ini memunculkan dua fenomena. Pertama, kekhawatiran dari Pemerintah Kolonial Belanda terhadap kehidupan dan ekstensinya dalam masyarakat pribumi. Kedua, memperlihatkan betapa kuatnya pemerintah daerah dari empat kota yang menjadi tempat berdirinya KSF. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan untuk menentukan film yang akan diputar di kota tersebut, Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk menunjuk anggota KPF.<sup>56</sup>

Film Ordonantie No. 742 tahun 1919, KPF memiliki peraturan-peraturan tentang penayangan film di bioskop antara lain; (1) KPF menyatakan bahwa film tersebut dianggap tidak merusak anak-anak dibawah 15 tahun; (2) memasang pengumuman pada pintu masuk dan tertera dalam tiket masuk bahwa film tersebut layak untuk ditonton oleh semua umur.<sup>57</sup> Film Ordonantie No. 377 tahun 1919 disebutkan dalam membiayai administrasi dan penguasaan, penonton diwajibkan untuk membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan oleh Gubernur Jenderal kepada Komisi Sensor film yang digunakan sebagai biaya untuk melakukan sensor setiap film yang diajukan.<sup>58</sup>

*Film Ordonantie 1925, Staatsblad No. 477* tahun 1925, diberlakukan pembaharuan dalam tubuh KPF yang semula bersifat regional menjadi komisi sentral untuk wilayah di seluruh Hindia Belanda. Komisi ini beranggotakan 15 orang.<sup>59</sup> Dalam Ordonansi ini memiliki peraturan antara lain; (1) Anak dibawah 17 tahun dilarang untuk menonton film kecuali film yang bersifat aman untuk semua umur, (2) Melarang film yang menentang ketertiban umum, kesusilaan, atau dengan alasan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum, (3) Memberikan kesempatan terhadap pemilik film yang filmnya ditolak sebagian atau seluruhnya, (4) bagian film yang ditolak akan dimusnahkan,<sup>60</sup>

Ordonansi Film “Filmordonantie Staatsblad” No. 507 tahun 1940.<sup>61</sup> Memberikan batasan-batasan dalam penayangan film, mekanisme sensor, dan

sanksi pidana. Dalam Ordonansi film ini, Pemerintah Kolonial Belanda memiliki peraturan-peraturan untuk membatasi film-film yang dianggap dapat mengancam kewibawaan Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>62</sup>

Pada masa Pendudukan Jepang, Jepang menganggap betapa pentingnya film sebagai media propaganda.<sup>63</sup> Oleh sebab itu, pemerintah Jepang melalui Dinas Propaganda Tentara Pendudukan Jepang (*Sendenbu Eiga Haikyusha*) menyita seluruh perusahaan perfilman yang ada di Indonesia.<sup>64</sup> Dalam melaksanakan kebijakan dalam dunia perfilman, pada Oktober 1942 Jepang membentuk *Jawa Eiga Kosha* (Perusahaan Film Jawa) yang diketuai oleh Oya Soichi.<sup>65</sup> Penyensoran film dijalankan secara ketat. Semua film yang berasal dari negara musuh dilarang untuk ditayangkan di bioskop. Kemudian dalam mengisi kekosongan pemerintah Jepang mendatangkan film-film yang berasal dari Jepang maupun dari negara sekutunya. Film-film yang didatangkan adalah film-film yang dikategorikan sebagai film yang sesuai dengan kebijakan nasional (*Kokusaku Eiga*),<sup>66</sup> film-film ini berisi tentang ajaran moral dan indoktrinasi politik yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, yang dianggap berguna bagi kepentingan propaganda.<sup>67</sup>

Pada masa kemerdekaan, belum ada lembaga penyensoran film. Kemudian pada tahun 1948 diberlakukan kembali *Film Ordonantie Staatsblad* tahun 1940 diberlakukan kembali. kemudian dibentuklah Panitia Pengawas Film (PPF) yang mengurus tentang perfilman.<sup>68</sup> Pemerintah RI dan Dewan Pertahanan Nasional kemudian menerbitkan surat yang berisi pembentukan Badan Pemeriksa Film (BPF) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan RI.<sup>69</sup>

Pada tahun 1951, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 23 tahun 1951, memutuskan bahwa film memiliki aspek pendidikan dan budaya sehingga Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan akan membawahi BPF melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 40439 tahun 1952 yang memberikan mandate kepada BPF untuk melaksanakan pengawasan terhadap film.<sup>70</sup>

Pada tanggal 5 Agustus 1964 melalui Penetapan Presiden no. 1 tahun 1964 tentang penegasan tentang perfilman<sup>71</sup>, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut, antara lain; (1) Menjadi pendukung dan pembela dasar-dasar ideology

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>55</sup> Heru, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>57</sup> Elvy, *op. cit.*, hlm. 231.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

<sup>61</sup> Heru, *op. cit.*, hlm. 8.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>63</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>64</sup> Elvy, *op. cit.*, hlm. 232.

<sup>65</sup> Ryadi, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>66</sup> Heru, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>68</sup> Elvy, *op. cit.*, hlm. 233.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 234.



Pancasila, (2) Mengandung pemberitaan kebijaksanaan yang bersifat konstruktif, (3) Memperhatikan ketertiban umum dan peraturan yang berlaku.

Menteri Pendarangan menerbitkan keputusan tentang penyensoran dan membentuk lembaga yang bernama Badan Sensor Film (BSF) melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 46/SK/M/1965.<sup>72</sup> Lembaga sensor ini memiliki fungsi dan tugas yaitu menghindarkan masyarakat dari pengaruh buruk film dan memperjelas proram pembangunan nasionalisme (*nation and character building*).<sup>73</sup>

## 2. Masuknya Film Impor

Dalam periode tahun 1950-an, film impor mulai memasuki perfilman Indonesia. Pada tahun 1953 pasar film Indonesia mengalami kemunduran dan semakin terpojok dengan adanya film-film impor<sup>74</sup> yang menjadi saingan utama film Indonesia pada waktu itu.<sup>75</sup> Film Malaysia bergenre komedi yang dibintangi oleh superstar komedi bernama P. Ramlee laku keras di Indonesia. Selain itu, film India juga mendapat tempat dalam dunia perfilman Indonesia.<sup>76</sup> Dalam periode ini pula, serbuan film-film impor dari Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia yang membuat industri film Indonesia menjadi tersaingi, hal ini dikarenakan film-film impor dari Amerika Serikat mempunyai kualitas dari segi gambar dan penyajian cerita yang lebih menarik.<sup>77</sup>

Dalam urusan perfilman pada tahun 1950-an, perfilman ditangani oleh beberapa kementerian dan departemen yaitu, Kementerian Perdagangan yang menangani pengimporan bahan baku dan peralatan film, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertugas mengurus masalah sensor film, Menteri Dalam Negeri menangani bioskop, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan bertugas menangani film impor, sedangkan Menteri Penerangan bertugas menangani masalah produksi film nasional.<sup>78</sup> Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam urusan film, maka tokoh perfilman nasional tidak tahu harus kemana dalam mengadukan masalah film impor yang membuat film nasional menjadi terdesak.<sup>79</sup> Dalam menghadapi masalah tersebut, para tokoh perfilman akhirnya menghadap langsung ke Presiden Soekarno untuk membahas masalah ini. Akhirnya, Pemerintah merespon untuk menekan dan membatasi film impor yang masuk ke Indonesia setelah adanya acaman dari Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI).<sup>80</sup>

Negara	1948	1949	1950	1951	1952
Indonesia	3	8	23	40	37
Amerika	302	296	660	660	844
India	5	34	12	8	22
Inggris	93	70	57	40	34
Tiongkok	115	121	76	182	161
Malaysia	5	2	2	13	30

**Tabel 1. Table Perbandingan Film Indonesia dan Impor yang tayang dibioskop pada tahun 1948-1952<sup>81</sup>**

Berdasarkan table diatas, jumlah produksi film Indonesia pada tahun 1948 – 1952 mengalami penurunan angka dari jumlah film impor secara keseluruhan. Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa film yang berasal dari Amerika sangat digemari daripada film Indonesia.<sup>82</sup>

## 3. Gejolak Politik yang tidak stabil

Adanya persaingan politik antara Komunisme dan Nasionalis agama yang mulai terlihat dalam perfilman Indonesia konflik ini terjadi pada akhir 1950-an dan awal tahun 1960-an. Pada tahun 1957 Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha menjadikan film sebagai alat politik mereka melalui Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat) dan lembaganya di bidang perfilman yaitu, Surbufis (Sarekat Buruh Film dan Seni Drama).<sup>83</sup> PKI menganggap bahwa film Amerika dan Eropa adalah penyebab dari terjepitnya film Indonesia.

Konsep "*Politik adalah Panglima*" dalam bidang kebudayaan yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan tidak bertentangan dengan garis partai komunis.<sup>84</sup> Konsep ini dimulai pada awal tahun 1960-an dengan Lekra sebagai inisiatornya. LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) yang merupakan organisasi di bidang kesenian dari PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Lesbi (Lembaga Seni Budaya Indonesia) organisasi kesenian dari Partindo (Partai Indonesia), kedua organisasi ini bersama dengan Lekra juga memprogandakan konsep "*Politik adalah Panglima*"<sup>85</sup>

Pada akhir tahun 1959, sebuah Musyawarah Film Nasional berlangsung. Pada bulan Oktober 1959, sebuah Musyawarah Film Nasional diselenggarakan.<sup>86</sup> Hasil Dalam musyawarah ini adalah mendesak pemerintah agar membentuk suatu badan penghubung tunggal antara pemerintah dan organisasi perfilman.<sup>87</sup> Selain itu, musyawarah ini juga meminta kursi bagi perwakilan tokoh film Indonesia di Majelis Permusyawaratan Rakyat

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 235.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

<sup>74</sup> Tjasmadi, *100 Tahun Bioskop Indonesia (1999-2000)* (Bandung: Megindo Tunggal Utama, 2008), hlm. 56.

<sup>75</sup> Widjaya, *op. cit.*, hlm. 96.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>77</sup> Tjasmadi, *op. cit.*, hlm. 56.

<sup>78</sup> Ardan, *Setengah Abad Festival Film Indonesia* (Jakarta: Panitia Festival Film Indonesia, 2004), hlm. 17.

<sup>79</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>80</sup> Misbach, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>81</sup> Ardan, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>82</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>83</sup> Salim, *op. cit.*, hlm. 68.

<sup>84</sup> Nugroho, *Bidang Sosial-budaya dalam rangka Ketahanan Nasional* (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Sejarah Hankam, 1968), hlm. 12.

<sup>85</sup> Salim, "*Politik Adalah Panglima Film: Perfilman Indonesia 1957-1965*", Prisma, 10 November 1978, hlm. 59.

<sup>86</sup> Alkhajar, *Masa-masa Suram Dunia Perfilman Indonesia* (Surakarta: Tesis USM, 2010), hlm. 76.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

(MPR) dan Dewan Perancang Nasional (Depernas).<sup>88</sup> Akhirnya desakan terhadap pemerintah dikabulkan, Pemerintah menginstruksikan kepada bank-bank pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara untuk membatu pengusaha film.<sup>89</sup> Kebijakan pemerintah yang membantu perfilman Indonesia ternyata tidak bisa menolong industry film, hal ini terjadi karena kebanyakan film yang diproduksi adalah sebuah film pesanan badan pemerintah, perusahaan negaa, atau bank-bank yang digunakan untuk mempromosikan kepentingan masing-masing. Selain itu, pengeluaran yang tidak terkontrol membuat maraknya korupsi di satu pihak.<sup>90</sup>

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan kedudukan kuat kepada Presiden Soekarno, Dekret ini juga memberikan kedudukan kuat kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisan-simpatisannya. Posisi kuat PKI ini digunakan untuk melakukan “*Offensive Revolution*” di bidang kebudayaan.<sup>91</sup> Pada masa ini, munculah bermacam-macam lembaga kebudayaan yang bernaung dibawah partai politik yang ada.<sup>92</sup> Organisasi kebudayaan yang didirikan tidak hanya untuk menyaingi Lekra dan LKN tetapi juga digunakan sebagai tempat-tempat seniman-seniman yang berlindung dari ancaman Lekra dan LKN yang selalu berusaha untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.<sup>93</sup>

Pergolakan politik yang terjadi membuat kalangan perfilman Indonesia berusaha untuk mencari pengaruh dalam pemerintahan agar bisa mengurus tentang perfilman.<sup>94</sup> Pada awal tahun 1960-an, kegiatan perfilman berada dalam sebuah Dewan Film yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No. 95/PMH/1959, dan Dewan ini diketuai oleh Kolonel Sukardjo. Namun, Dewan ini masih belum bisa menangani perfilman Indonesia.

Pada Juli 1961, Keinginan kalangan tokoh film ini akhirnya dikabulkan oleh pemerintah melalui Penetapan Presiden (Perpres) No. 1 tahun 1964. Perpres ini menetapkan bahwa pembinaan film berada dibawah wewenang Departemen Penerangan.<sup>95</sup> Keputusan ini membuat Lekra tidak setuju yang menginginkan pengawasan film berada dibawah wewenang Prof. Sr. Prijono seorang Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan simpatisan PKI.<sup>96</sup>

Kekecewaan PKI terhadap Perpres ini memunculkan gerakan sepihak dari PKI dan simpatisan-simpatisannya dalam memboikot film-

film dari Amerika Serikat.<sup>97</sup> Pada tanggal 8 Mei 1964, Kemudian berdirilah Panitia Aksi Pengganyangan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) yang melakukan pemboikotan terhadap film-film Imperialis dari Amerika Serikat dan Eropa yang masuk ke Indonesia kemudian menggantinya dengan film dari negara-negara Sosialis<sup>98</sup> yang cenderung tidak diminati oleh masyarakat.<sup>99</sup> Aksi PAPFIAS ini dengan cepat menyebar di berbagai wilayah di Indonesia dan juga berhasil membubarkan organisasi yang mempunyai hak mengatur film Amerika dan Eropa yang masuk ke Indonesia yaitu *American Motion Pictures Association Indonesia* (AMPAI)<sup>100</sup> yang berakibat film-film Amerika Serikat tidak dapat masuk ke Indonesia<sup>101</sup>.

Pelarangan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) oleh Presiden Soekarno memberikan semangat yang besar bagi PKI dan simpatisan-simpatisannya.<sup>102</sup> PAPFIAS yang menggunakan cap Manikebu ini kemudian melakukan pengganyangan dan memboikot film-film Amerika yang dicap sebagai film Imperialis Amerika, selain itu PAPFIAS juga melakukan pemboikotan kepada tokoh-tokoh perfilman Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka.<sup>103</sup>

Kegagalan PKI dalam pemberontakan pada 30 September 1965 dan kemudian dibubarkan oleh pemerintah membuat tokoh perfilman dan pemerintah Indonesia mulai untuk membangun kembali perfilman Indonesia yang telah mengalami kehancuran dengan melakukan usaha-usaha untuk memulihkan kembali perfilman Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pada tanggal 3 Oktober 1966 tentang pembebasan kuota impor film, dari setiap film impor, pemerintah mendapatkan dana dari para importir film, kemudian dana yang diserahkan kepada Dewan Film Nasional (DFN) yang akan digunakan untuk membuat film-film nasional.<sup>104</sup> Lembaga sensor juga melonggarkan system sensornya.<sup>105</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa dinamika perfilman Indonesia mengalami ketidakpastian, hal ini bisa dilihat dari jumlah produksi film yang mengalami pasang-surut. Dalam perfilman nasional, para pembuat film tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan cerita yang membuat film Indonesia selalu dibuat dengan ide-ide cerita itu-itu saja. Dalam hal ini, sehingga para pembuat film tidak dapat membuat cerita berdasarkan realitas sosial yang

<sup>88</sup> Salim, “*Politik Adalah Panglima Film... op. cit.*”, hlm. 83

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>90</sup> Ismail, “*Masa Pra Gestapu, Sejarah Hitam Perfilman Nasional*”, Sinar Harapan, 6 Oktober 1970, hlm. 3.

<sup>91</sup> Alkhajar, *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>94</sup> Situmorang, “*Meninggikan Nilai Artistik Film Indonesia*”, Purnama, Th. II, No. 18, 1964

<sup>95</sup> Salim, “*Politik adalah Panglima Film... op. cit.*”, hlm. 85.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>98</sup> Pahotan, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>99</sup> Salim, *op. cit.*, hlm. 69.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>101</sup> Alkhajar, *op. cit.*, hlm. 35.

<sup>102</sup> Jauhari, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>103</sup> Alkhajar, *op. cit.*, hlm. 35.

<sup>104</sup> Misbach, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 40.



ada dalam masyarakat. Selain itu, film-film Indonesia tidak mengalami perkembangan dari segi cerita dikarenakan kurangnya ruang untuk berkreasi membuat para pembuat film mengalami kekangan dari rezim yang berkuasa.

Dari ketidakmampuan beradaptasi dalam perkembangan teknologi perfilman membuat kalah bersaingnya film-film Indonesia dengan film-film impor, karena film-film Indonesia tidak mengadaptasi teknologi yang digunakan oleh film-film impor. Selain itu, minat konsumen mengalami perubahan yang disebabkan konsumen mengalami perubahan pola pikir yang menuju kedewasaan sehingga konsumen bisa menentukan film yang layak dan berkualitas

Dinamika Perfilman Indonesia tahun 1940-1966 mengalami beberapa hambatan dalam perkembangannya antara lain kebijakan sensor yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda hingga masa Orde Lama sehingga membuat insan perfilman Indonesia merasa kurangnya kreativitas dalam membuat film tentang realitas sosial pada masa itu. Kemudian Banyaknya film impor yang masuk ke Indonesia sehingga membuat industri perfilman Indonesia mengalami kemunduran dikarenakan film impor lebih diminati dari segi cerita maupun kualitas gambar daripada film nasional, Serta Gejolak Politik yang terjadi di Indonesia yang membuat kebijakan-kebijakan di dunia perfilman yang berubah-ubah membuat industri perfilman mengalami pasang surut.

#### Saran

1. Sebaiknya para pelaku perfilman harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memahami berbagai fakta sejarah dari perfilman Indonesia, diharapkan berbagai pihak dapat mengambil pelajaran berharga untuk kedepannya agar mampu membawa perfilman mampu bersaing dengan film-film impor yang beredar di Indonesia
2. Kurangnya kerarsipan dan dokumen mengenai sejarah perfilman Indonesia sehingga dituntut untuk lebih menggiatkan penelitian dan dokumentasi mengenai permasalahan perfilman Indonesia. Karena minat untuk melakukan penelitian tentang perfilman tanah air justru lebih banyak diambil dari penelitian terdahulu dengan mengambil penelitian dari peneliti asing.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Arsip/Dokumen

- Staatblad van Nederlandsch Indies Tahun 1916 No. 227; 1919 No. 337, 742; 1920. No. 356; 1922. No. 227, 272; 1925. No. 477; 1940. No. 507.
- Arsip/Dokumen Dewan Film Indonesia. 1964. Surat No: Srt/330/18/ DFI/1964, tentang *Penutupan Bioskop*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang *Pembinaan Perfilman* (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2622).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1992 *Tentang Perfilman*. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473).

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 tentang *Lembaga Sensor Film*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12).

##### B. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Alkhajar, Eka Nada Shofa (2010). *Masa-Masa Suram Dunia Perfilman Indonesia (Studi Periode 1957- 1968 dan 1992-2000)*. Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret.
- Ardiyanti, Handrini. 2017. *Perfilman Indonesia: Perkembangan Dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Erwanto, Heru. 2010. *Sejarah Sensor Film di Indonesia*. Bandung: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Franto, Pahotan. 2009. *Seks dalam Film Indonesia, 1970 - 1996: Bumbu Film Indonesia*. Depok: Skripsi Universitas Indonesia.
- Indra, D. 2012. *Peran Usmar Ismail dalam Perkembangan Perfilman Nasional 1926-1972*. Bandung : Skripsi Universitas Padjajaran.
- Kurnia, Novia. 2006 *Lambannya Pertumbuhan Perfilman Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 9 No. 3. 271-296.
- Situmorang, Sitor. 1964. "Meninggikan Nilai Artistik *Film Indonesia*", Purnama, Th. II, No. 18.

##### C. Buku

- Abdullah, Taufik, Misbach Yusa Biran, dan SM Ardan. 1993. *Film Indonesia Bagian I (1900-1950)*. Jakarta: Sinematek Indonesia.
- Amura, H. 1989. *Perfilman di Indonesia dalam Era Orde Baru*, Jakarta: Lembaga Komunikasi Massa Islam Indonesia.
- Ardan, S.M. 1984. *Data Perbioskopian di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia dan PERFIN.
- Ardan, S.M. 1992. *Dari Gambar Ideop ke Sinepleks*. Jakarta: Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia.
- Ardan, S.M. 2004. *Setengah Abad Festival Film Indonesia*, Jakarta: Panitia Festival Film Indonesia.
- Biran, Misbach Y. 1982. *Selintas Kilas Sejarah Film Indonesia*. Jakarta; Badan Pelaksana FFI.
- Biran, Misbach Y. 2009. *Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa*, Jakarta: Komunitas Banu.
- Imanjaya, Ekky. 2006. *A to Z About Indonesian Film*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Ismail, Usmar. 1983. *Mengupas Film*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ismail, Yahya. 1972. *Pertumbuhan Perkembangan dan Kejatuhan LEKRA di Indonesia*. Kuala Lumpur: Khee Meng.
- Iskandar, Eddy. 1987. *Mengenal Perfilman Nasional*. Bandung: CV Rosda.

- Jauhari, Haris. 1992. *Layar Perak: 90 tahun Bioskop di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kristanto, JB. 2004. *Nonton Film, Nonton Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas .
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Maria, Elvy. 2017. *Paradoks dan Manajemen Kreativitas dalam Industri Film Indonesia*, Salatiga: Satya Wacna University Press.
- McQuail, D. 2004. *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Notosusanto, Nugroho. 1968. *Bidang Sosial-Budaya Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Sejarah Hankam.
- Nugroho, Garin dan Herlina, Dyna. 2015, *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Prakosa, Gotot. 2004. *Film dan Kekuasaan*. Jakarta: Yayasan Seni Visual Indonesia.
- Said, Salim. 1991. *Profil Dunia Film Indonesia*. Jakarta: Pustakakarya Grafikatama.
- Sen, K. 2009. *Kuasa Dalam Sine : Negara, Masyarakat, dan Sinema Orde Baru*. Yogyakarta: Ombak.
- Tjasmadi, HM. Johan. 2008. *100 Tahun Sejarah Bioskop di Indonesia*. Bandung: Megindo Tunggal Sejahtera.

#### D. Majalah

- Gunawan, Ryadi. "Sejarah Perfilman Indonesia". Majalah Prisma Juli 1990: 20 – 28
- Ismail, "Masa Pra Gestapu, Sejarah Hitam Perfilman Nasional", Sinar Harapan, 6 Oktober 1970.
- Said, Salim. "Politik adalah Panglima Film: Perfilman Indonesia 1957-1965". Majalah Prisma November 1978: 80 – 89.

#### E. Internet

- Desika Pemitita. 2021. "Ini Sejarah Perfilman Indonesia dari Masa ke Masa". <https://arahkata.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1281698504/ini-sejarah-perfilmanindonesia-dari-masa-ke-masa>. (Diakses pada 1 Februari 2022 pukul 16.26 WIB).
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. *Filmordonnantie Staatsblad 1940 No. 507*. <https://jdih.go.id/search/kolonial/detail/869737> (diakses pada 22 Januari 2022 pukul 20.34 WIB).
- Ningsih, Widya Lestari. 2021. "Sejarah Perfilman di Indonesia". <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/14/150000979/sejarah-perfilman-diindonesia?page=all>. (diakses pada 24 Januari 2022 pukul 21.22 WIB).